



MENGATASI STIGMA: MEMBANGUN MASYARAKAT YANG MENGHARGAI DIVERSITAS PENYANDANG DISABILITAS DI DESA LAURAN-AMBON

Macaria Theresia Laiyan¹, Angela Florida Mau²

UNMER Malang, Indonesia

STP IPI Malang, Indonesia

-mail:angelamau85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk meneliti strategi mengatasi stigma dan membangun masyarakat yang menghargai diversitas penyandang disabilitas di Desa Luran-Ambon. Data utama diperoleh dari literatur ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, pemberdayaan kolaboratif antara Pemerintah Desa Luran dan BUMDesa Luran melibatkan penyandang disabilitas dalam pemetaan kebutuhan mereka. Meskipun masih berorientasi top-down, langkah-langkah pemberdayaan ini mengarah pada inklusi yang lebih baik. Kedua, pentingnya memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi di kelompok sosial menjadi strategi krusial. Dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas membantu penyandang disabilitas menyesuaikan diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Strategi ketiga adalah adaptasi dalam kelompok sosial, termasuk beradaptasi dengan berbagai reaksi dan kecepatan bergabung yang berbeda-beda. Pendekatan ini memperhatikan jenis disabilitas individu tanpa menonjolkan agar tidak mencolok. Strategi pemberdayaan juga melibatkan masyarakat umum dalam proses inklusi, menciptakan lingkungan inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi desa. Melalui keberadaan local champion seperti Kepala Desa dan Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas, pemberdayaan ini menjadi lebih kuat dan memberikan contoh positif bagi masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, penelitian ini berhasil membangun kesadaran inklusi dan mengatasi stigma terhadap penyandang disabilitas di Desa Luran-Ambon.

Kata Kunci : Pemberdayaan, inklusif, disabilitas.

Abstract

This research uses a literature study method to examine strategies for overcoming stigma and building a society that respects the diversity of people with disabilities in Lauran-Ambon Village. The main data was obtained from scientific literature, books and official documents relevant to the research topic. There are several strategies that can be applied. First, collaborative empowerment between the Lauran Village Government and Lauran Village BUMDes involves people with disabilities in mapping their needs. Although still top-down oriented, these empowerment steps lead to better inclusion. Second, the importance of having self-confidence in interacting in social groups is a crucial strategy. Support from family, the surrounding environment and the wider community helps people with disabilities adapt and participate actively in social activities. The third strategy is adaptation within social groups, including adapting to varying reactions and different joining rates. This approach pays attention to the individual's type of disability without highlighting it so as not to be conspicuous. The empowerment strategy also involves the general community in the inclusion process, creating an inclusive environment where everyone has the same opportunity to contribute to the social and economic life of the village. Through the existence of local champions such as Village Heads and Heads of Disabled Community, this empowerment becomes stronger and provides a positive example for the community. By implementing these strategies, this research succeeded in building awareness of inclusion and overcoming stigma against people with disabilities in Lauran-Ambon Village.

Keywords: *Empowerment, inclusiveness, disability.*

PENDAHULUAN

"Difable" adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu dengan disabilitas fisik, yang sering kali dikenal sebagai "Penyandang Disabilitas" dalam konteks modern. Masyarakat sering menempatkan difable di posisi yang merendahkan, menganggap mereka sebagai kelompok marginal yang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara. Hal ini menjadikan mereka rentan terhadap diskriminasi, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat membawa mereka menuju kesejahteraan (Harahap, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas, mereka adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Mereka mengalami hambatan saat berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya, yang membuat partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak

efektif dan penuh, karena mereka tidak mendapatkan hak yang sama seperti individu lainnya (Habibi, 2014).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai sebuah momen penting dan peluang besar bagi Desa untuk melakukan perubahan yang signifikan, menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakatnya. Transisi dari pendekatan otonomi menuju kebijakan yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa atas wilayahnya telah mendorong terjadinya perubahan yang substansial. Perubahan dalam kewenangan ini memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk melakukan peningkatan dalam sistem pemerintahannya. Terlebih lagi, desa-desa umumnya memiliki modal sosial dan sistem sosial yang diwarisi, serta memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan bersama secara lebih baik.

Pentingnya kesadaran pemerintah desa akan kondisi yang diwariskan ini terlihat dalam upaya internalisasi dalam program-program pembangunan, yang dikenal sebagai pembangunan endogen. Melalui pendekatan ini, desa-desa dapat memanfaatkan potensi lokal dan kearifan yang ada untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, Undang-undang Desa menjadi landasan bagi Desa untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan lebih efektif dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh komunitasnya.

Desa kini tak hanya dianggap sebagai simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai entitas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahannya. Fleksibilitas yang dimiliki dalam ranah pemerintahan ini dapat mendorong desa untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi hak-hak masyarakatnya dan mengelola kepentingan lokal, termasuk dalam penanganan kelompok-kelompok marginal seperti penyandang disabilitas. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 mengindikasikan bahwa sekitar 12,29% atau sekitar 31,2 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia di atas dua tahun mengalami disabilitas. Persentase terbesar dari kelompok ini adalah usia lanjut, mencapai 57,26%, diikuti oleh usia produktif sebesar 11,12%, dan anak-anak sekitar 4,19% (BPS, 2023).

Hasil survei di 11 Provinsi di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kondisi penyandang disabilitas masih memperlihatkan tantangan yang serius, terutama dalam empat aspek kunci: pendidikan, penerimaan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Studi Adioetomo juga mencatat bahwa penyandang disabilitas mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu non-disabilitas. Menurut data Susenas tahun 2023, sekitar 11,04% penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan, dengan 15,38% di antaranya mengalami disabilitas berat. Distribusi

geografis menunjukkan bahwa sebanyak 47,91% dari mereka tinggal di pedesaan, dengan komposisi 42,42% merupakan anak-anak penyandang disabilitas, 47,61% merupakan penyandang disabilitas usia produktif, dan 50,14% merupakan penyandang disabilitas usia lanjut (lansia) (BPS, 2023).

Di lingkungan pedesaan, stigma terhadap penyandang disabilitas seringkali mencapai tingkat yang sangat merugikan. Penelitian yang dilakukan oleh Maftuhin menggambarkan dengan detail bagaimana istilah-istilah peyoratif seperti difabel atau penyandang catat, idiot, 'kelainan', picek (dalam bahasa Jawa), dan sejenisnya, digunakan secara luas untuk merendahkan martabat penyandang disabilitas, baik dalam konteks bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Penggunaan istilah-istilah negatif ini mengakibatkan penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai beban atau masalah yang harus disembunyikan, bahkan dikecualikan dari hak-hak dan kesempatan yang seharusnya mereka miliki dalam masyarakat. Fenomena ini juga disorot dalam penelitian Eny dan Rumiati, yang menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di pedesaan semakin merosot, mengurangi peran mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan kondisi ini, penyandang disabilitas sering merasa terpinggirkan, rendah diri, dan kesulitan berintegrasi secara sosial, mengakibatkan isolasi dan kesulitan dalam mengembangkan potensi serta keterampilan mereka (Puspitasari et al., n.d.).

Penulis artikel "Mengatasi Stigma: Membangun Masyarakat yang Menghargai Diversitas Penyandang Disabilitas di Desa Luran-Ambon" dilatar belakangi dari mengangkat isu kompleks tentang stigma yang sering terkait dengan penyandang disabilitas. Stigma ini tidak hanya mencakup stereotip negatif yang merugikan perkembangan pribadi mereka, tetapi juga mencakup diskriminasi yang menghambat akses mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial yang sehat. Masalah utama terletak pada kurangnya pemahaman

mendalam tentang kondisi-kondisi disabilitas, kebutuhan yang unik dari individu yang memiliki disabilitas, dan potensi sebenarnya yang dimiliki oleh mereka. Hal ini seringkali mengakibatkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan dukungan dan penerimaan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara optimal.

Selain itu, aksesibilitas yang terbatas, baik dalam hal fisik maupun sosial, juga menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Tidak adanya fasilitas yang ramah disabilitas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan aksesibilitas menyebabkan penyandang disabilitas sering merasa terpinggirkan dan tidak diakomodasi dengan baik dalam berbagai situasi. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Luran-Ambon, permasalahan ini seringkali menjadi lebih rumit karena kurangnya infrastruktur yang mendukung dan minimnya kesadaran akan pentingnya inklusi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, membangun masyarakat yang menghargai diversitas penyandang disabilitas bukanlah tugas yang mudah. Hal ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, komunitas lokal, dan individu-individu yang peduli. Langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kesadaran melalui edukasi publik, menciptakan kebijakan inklusif, memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial, serta memberdayakan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi menjadi sangat penting untuk mengatasi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi semua individu, tanpa terkecuali. Melalui upaya bersama ini, diharapkan stigma terhadap penyandang disabilitas dapat diatasi, dan masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan menghargai diversitas dalam segala aspek kehidupan.

Banyak sekali situasi yang konkret di Desa Luran menjadi landasan yang kuat untuk menyoroti kompleksitas stigma yang sering terkait dengan penyandang disabilitas. Contoh kasus seperti diskriminasi di tempat kerja, tantangan dalam akses pendidikan,

keterbatasan aksesibilitas di ruang publik, tantangan kesehatan mental, dan pengalaman perjalanan menyediakan ilustrasi yang jelas tentang dampak nyata dari stigma ini dalam kehidupan sehari-hari individu di desa tersebut.

Sebagai contoh, diskriminasi di tempat kerja dapat menggambarkan bagaimana stigma terhadap disabilitas berkontribusi pada perilaku diskriminatif, seperti pemecatan tidak adil atau penolakan promosi. Hal ini juga dapat menyoroti pentingnya membangun lingkungan kerja yang menghargai keberagaman untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, tantangan dalam akses pendidikan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana stigma di lingkungan pendidikan mempengaruhi akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan yang setara dengan rekan-rekannya yang lain.

Selanjutnya, keterbatasan aksesibilitas di ruang publik menggambarkan betapa pentingnya memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam perencanaan dan desain kota. Tantangan kesehatan mental juga menjadi perhatian, di mana stigma sosial sering membuat penyandang disabilitas enggan mencari bantuan atau dukungan yang mereka butuhkan. Pengalaman perjalanan, pada gilirannya, memberikan wawasan tentang bagaimana stigma terhadap disabilitas dapat memengaruhi pengalaman sehari-hari individu dalam hal mobilitas dan interaksi sosial.

Melalui pemahaman mendalam tentang situasi konkret ini, artikel ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana stigma terhadap disabilitas tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi kualitas hidup dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembahasan lebih lanjut akan mengarah pada strategi dan inisiatif yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai diversitas, terutama bagi individu dengan disabilitas di Desa Luran-Ambon.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini memakai studi literatur tentang mengatasi stigma dan membangun masyarakat yang menghargai diversitas penyandang disabilitas di Desa Luran-Ambon, kami mengadopsi metode yang sistematis dan terstruktur. Langkah pertama adalah menetapkan fokus penelitian yang jelas, yaitu stigma terhadap penyandang disabilitas dan upaya membangun kesadaran inklusif di masyarakat desa. Selanjutnya, kami melakukan pencarian literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, dan dokumen resmi yang mengulas topik yang relevan. Analisis literatur dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan temuan-temuan kunci yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan. Selama proses analisis, kami membangun kerangka konseptual yang menghubungkan dengan terkait strategi yang dapat di pakai yang dapat mempengaruhi stigma terhadap penyandang disabilitas dalam mengatasi stigma dan membangun kesadaran masyarakat tentang inklusi dan penghargaan terhadap diversitas. Akhirnya, hasil temuan dan rekomendasi dari analisis literatur kami susun dalam sebuah laporan yang mencakup ringkasan yang komprehensif dan rekomendasi praktis untuk memajukan inklusi sosial dan kesadaran tentang keberagaman di Desa Luran-Ambon. Dengan pendekatan ini, kami bertujuan untuk tidak hanya memahami masalah yang dihadapi, tetapi juga memberikan panduan konkret untuk mengimplementasikan solusi yang dapat menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desa Luran Ambon Sebagai Desa Disabilitas

Situasi di Ambon menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai fasilitas dan pelayanan umum. Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Aria Indrawati, menyoroti bahwa banyak

fasilitas umum di Ambon masih belum ramah terhadap disabilitas. Hal ini tercermin dari kesulitan akses yang dialami oleh warga berkebutuhan khusus, terutama dalam mengakses gedung pemerintah daerah dan jalanan di sekitarnya yang tidak rata dan banyak yang rusak.

Aria juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap sekolah khusus bagi penyandang disabilitas di Ambon. Meskipun ada peralatan kesenian atau musik yang disediakan, namun peralatan tersebut hanya dapat diakses saat menjelang perlombaan atau acara tertentu. Ini mengindikasikan bahwa bakat para siswa berkebutuhan khusus tidak diasah secara optimal, karena terbatasnya akses terhadap peralatan yang seharusnya dapat digunakan setiap saat untuk latihan dan pengembangan bakat.

Dalam konteks ini, Aria mengajukan saran untuk adanya komitmen dari Pemerintah Kota Ambon untuk menjadikan Ambon sebagai kota yang inklusif. Ini mencakup jaminan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk akses terhadap fasilitas umum, pendidikan, dan pengembangan bakat. Dengan adanya regulasi seperti Peraturan Daerah yang mendukung dan melindungi hak penyandang disabilitas, diharapkan kondisi ini dapat membaik dan memberikan akses yang lebih baik bagi mereka (Sangadji, n.d.).

Di Desa Luran, Ambon, keberadaan penyandang disabilitas menunjukkan keragaman yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat setempat. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga terkait dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah penyandang disabilitas di desa tersebut, termasuk jenis disabilitas yang dimiliki. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi penyandang disabilitas di Desa Luran adalah bagian yang signifikan dari komunitasnya.

Situasi di Desa Luran, Ambon, mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sehari-hari. Dengan infrastruktur yang kurang

ramah disabilitas, seperti jalanan yang tidak rata dan minimnya fasilitas transportasi yang sesuai, mobilitas penyandang disabilitas dapat sangat terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke sekolah atau tempat kerja, mengakses layanan kesehatan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Selain itu, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai juga memperburuk situasi ini. Penyandang disabilitas mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan rekan-rekan sebayanya, karena sekolah-sekolah belum dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Begitu juga dengan akses layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, yang dapat menghambat upaya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Dampak dari kurangnya fasilitas dan aksesibilitas ini sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas di Desa Luran. Mereka mungkin mengalami kesulitan ekonomi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan merasa tidak diakui oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Dengan menyadari situasi ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya tentang memenuhi hak-hak dasar mereka, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menghargai diversitas individu. Melalui langkah-langkah konkret seperti pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, pelatihan dan pendidikan yang inklusif, serta dukungan sosial yang kuat, Desa Luran dapat menjadi lingkungan yang lebih baik untuk semua warga, termasuk penyandang disabilitas.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Luran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas membutuhkan langkah-langkah yang holistik dan terintegrasi. Pertama-tama, edukasi yang komprehensif tentang berbagai jenis disabilitas dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari perlu diberikan secara intensif. Hal ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya inklusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif (Organization, 2022). Selanjutnya, penting untuk meningkatkan aksesibilitas fisik di seluruh wilayah desa, termasuk infrastruktur jalan dan akses menuju fasilitas publik seperti sekolah dan tempat ibadah (Organization & Organization, 2020).

Selain itu, upaya pemberdayaan penyandang disabilitas juga harus ditekankan melalui pelatihan keterampilan dan pembangunan sumber daya manusia. Ini akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi di Desa Luran. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan program-program inklusi yang relevan dan berkelanjutan (Imrie, 2018).

Selanjutnya, media lokal dan kampanye publik juga harus dimanfaatkan secara efektif untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk menghapus stigma yang masih ada di masyarakat dan mendorong pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya inklusi. Dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama juga sangat berperan dalam memperkuat kesadaran dan mendukung upaya inklusi bagi penyandang disabilitas (Organization & Organization, 2020).

Terakhir, evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak dari program-program inklusi perlu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini penting untuk mengukur efektivitasnya, mengidentifikasi area

perbaikan yang diperlukan, dan memastikan bahwa tujuan inklusi yang lebih besar di Desa Luran dapat tercapai dengan optimal (United Nations Development Programme, 2021). Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan Desa Luran dapat menjadi teladan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, menghormati hak-hak semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Meningkatkan Aksesibilitas Fisik dan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Di Desa Luran, Ambon, pentingnya meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas menjadi sebuah prioritas yang tidak bisa diabaikan. Saat ini, kondisi infrastruktur fisik di Desa Luran masih jauh dari ramah disabilitas. Jalanan yang tidak rata, trotoar yang sempit dan tidak bebas hambatan, serta kurangnya fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di desa ini. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk beraktivitas secara mandiri dan merasa terbatas dalam mengakses berbagai layanan dan fasilitas yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua warga desa.

Ketika kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, kita perlu memperhatikan berbagai aspek yang meliputi kebutuhan fisik maupun aksesibilitas komunikasi. Misalnya, jalanan yang rata dan trotoar yang lebar akan memudahkan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya untuk bergerak dengan lebih mudah dan nyaman. Selain itu, fasilitas publik seperti sekolah, pusat kesehatan, dan tempat ibadah juga harus dirancang agar dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya hambatan fisik, seperti tangga yang terlalu tinggi atau pintu yang terlalu sempit (Propiona, 2021).

Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif secara fisik, kita juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif. Saat penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai fasilitas dan layanan dengan mudah, mereka akan merasa lebih

termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Luran. Hal ini akan membantu mengurangi isolasi sosial yang sering dialami oleh penyandang disabilitas dan membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat lebih luas (Propiona, 2021).

Namun, untuk mencapai lingkungan yang inklusif secara fisik dan sosial, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Perlu dilakukan koordinasi yang baik antara berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya inklusi dan menghilangkan stigma serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Propiona, 2021).

Di sisi lain, peran teknologi juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Desa Luran. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah akses informasi dan layanan bagi penyandang disabilitas, serta memungkinkan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi secara virtual. Selain itu, pengembangan aplikasi atau platform khusus untuk penyandang disabilitas juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan inklusi di Desa Luran (Roebyantho, 2020).

Dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Desa Luran dapat menjadi contoh yang baik dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Dengan memperhatikan kebutuhan fisik dan sosial mereka, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan, kita dapat menciptakan desa yang lebih ramah, inklusif, dan berkeadilan bagi semua individu.

Memperhatikan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Kasus Desa Lauran di Ambon menjadi sebuah contoh konkret yang menggambarkan pentingnya kebijakan dan regulasi yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Desa Lauran, seperti banyak daerah pedesaan di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan aksesibilitas fisik dan sosial yang memadai bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur yang belum ramah disabilitas, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, serta minimnya regulasi yang mengatur perlindungan dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi menjadi masalah yang harus diatasi.

Pertama-tama, perlu ada kebijakan yang jelas dan komprehensif tentang hak-hak penyandang disabilitas di Desa Lauran. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek penting seperti hak atas pendidikan yang inklusif, aksesibilitas fisik ke fasilitas kesehatan, pekerjaan yang layak dan inklusif, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya desa. Hal ini penting untuk memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan stakeholder terkait dalam upaya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas (Probosiwi, 2017).

Implementasi kebijakan juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dengan serius. Memiliki kebijakan saja tidak cukup jika tidak dijalankan dengan efektif dan diawasi secara berkala. Di Desa Lauran, hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan tim atau badan khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut. Tim ini dapat terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM yang peduli terhadap isu disabilitas, serta penyandang disabilitas itu sendiri untuk memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mengenai hak-hak mereka.

Selanjutnya, pendekatan partisipatif sangat penting dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terkait penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan

hingga evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili dengan baik dalam kebijakan yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mereka (Sholihah, 2016).

Selain kebijakan yang bersifat umum, penting juga untuk memiliki regulasi yang lebih spesifik dan terukur terkait aksesibilitas fisik dan sosial di Desa Lauran. Misalnya, regulasi mengenai pembangunan infrastruktur harus memuat standar-standar yang jelas terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti lebar trotoar, penggunaan tandu atau lift di tempat-tempat umum, dan fasilitas parkir khusus. Regulasi ini harus didukung dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasinya yang baik (Sholihah, 2016).

Pemerintah desa juga harus bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Misalnya, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk menciptakan peluang kerja yang inklusif, atau bekerja sama dengan organisasi yang memiliki expertise dalam aksesibilitas fisik untuk membantu dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas (Sholihah, 2016).

Penting juga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas tentang pentingnya inklusi dan hak-hak penyandang disabilitas. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar atau pelatihan, serta pemberian informasi secara berkala melalui media lokal. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dikurangi, sehingga memperkuat dukungan terhadap implementasi kebijakan yang inklusif.

Dalam implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas di Desa Lauran, evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang

dijalankan memberikan hasil yang optimal. Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas itu sendiri, sehingga feedback dan rekomendasi yang diberikan lebih akurat dan bermanfaat untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan kesadaran yang meningkat, kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta implementasi yang efektif dan partisipatif, Desa Luran di Ambon dapat menjadi contoh yang sukses dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati hak-hak semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan inklusif bagi semua warganya.

Membangun Kesadaran di Kalangan Pekerja Sosial

Pentingnya membangun kesadaran di kalangan pekerja sosial, tenaga medis, pendidik, dan profesional lainnya tentang cara terbaik untuk mendukung penyandang disabilitas menjadi esensial dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan bermartabat bagi semua individu. Desa Luran, seperti banyak daerah pedesaan di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan dukungan yang sesuai dan bermartabat bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pemahaman yang kurang baik tentang kebutuhan individu, kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang bekerja dengan penyandang disabilitas, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan sosial yang memadai. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan peningkatan kompetensi di kalangan tenaga kerja yang relevan menjadi langkah krusial dalam menciptakan lingkungan inklusif di Desa Luran.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada kebutuhan individu menjadi sangat penting dalam memberikan dukungan yang efektif dan bermartabat bagi mereka.

Hal ini melibatkan identifikasi dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dari setiap individu disabilitas di Desa Luran. Misalnya, seseorang dengan disabilitas fisik mungkin membutuhkan aksesibilitas fisik yang lebih baik, sementara seseorang dengan disabilitas intelektual mungkin memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial (Huripah, 2019).

Dalam konteks Desa Luran, pelatihan khusus bagi pekerja sosial, tenaga medis, pendidik, dan profesional lainnya menjadi sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis disabilitas, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, serta strategi terbaik untuk mendukung setiap individu secara bermartabat. Misalnya, pekerja sosial perlu dilatih tentang cara memberikan dukungan psikososial yang tepat bagi penyandang disabilitas dan keluarganya, sedangkan tenaga medis memerlukan pelatihan tentang pelayanan kesehatan yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan disabilitas.

Selain itu, peningkatan kompetensi juga harus mencakup pemahaman tentang hak-hak dan kebijakan yang relevan terkait penyandang disabilitas. Di Desa Luran, banyak penyandang disabilitas mungkin belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka atau mengalami diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi yang komprehensif tentang hak-hak disabilitas, termasuk akses terhadap layanan publik yang setara dengan non-disabilitas dan perlindungan dari diskriminasi.

Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan aspek keberagaman dan inklusi dalam pelatihan ini. Desa Luran, seperti banyak daerah di Indonesia, memiliki masyarakat yang beragam dengan budaya, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelatihan harus mencakup pemahaman tentang keberagaman ini dan bagaimana memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas,

merasa dihargai dan diakui dalam komunitas mereka. Misalnya, pendidik perlu dilatih tentang strategi pengajaran inklusif yang mempertimbangkan keberagaman budaya dan bahasa dalam kelas mereka.

Selain dari pelatihan dan peningkatan kompetensi, penting juga untuk membangun kerja sama lintas-sektor dan lintas-lembaga dalam mendukung penyandang disabilitas di Desa Luran. Ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa aksesibilitas dan dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas mencakup semua aspek kehidupan mereka. Misalnya, melalui kerja sama lintas-sektor, dapat dibangun sistem rujukan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap individu disabilitas mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sosial yang mereka butuhkan (Iskandar & Si, 2017).

Selanjutnya, penting juga untuk mengintegrasikan pendekatan inklusi dalam berbagai program dan kegiatan di Desa Luran. Misalnya, dalam pendidikan, sekolah-sekolah harus menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif dan memberdayakan siswa-siswa disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Di sektor kesehatan, pusat kesehatan harus menyediakan layanan kesehatan yang ramah disabilitas dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk mengelola kondisi kesehatan mereka dengan baik.

Tidak kalah pentingnya adalah membangun jaringan dan komunitas yang mendukung bagi penyandang disabilitas di Desa Luran. Hal ini mencakup pembentukan kelompok dukungan, forum diskusi, dan kegiatan sosial atau budaya yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Melalui jaringan dan komunitas ini, penyandang disabilitas dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memperoleh informasi serta sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Iskandar & Si, 2017).

Terakhir, evaluasi dan pemantauan terhadap progres peningkatan kesadaran dan kompetensi di kalangan tenaga kerja dan profesional lainnya juga menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan upaya ini. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau pengamatan langsung terhadap praktik-praktik dan perilaku yang mendukung inklusi dan bermartabat bagi penyandang disabilitas. Dengan informasi yang diperoleh dari evaluasi ini, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan inklusi yang lebih besar di Desa Luran.

Dalam kesimpulan, membangun kesadaran di kalangan pekerja sosial, tenaga medis, pendidik, dan profesional lainnya tentang cara terbaik untuk mendukung penyandang disabilitas di Desa Luran adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bermartabat bagi semua individu. Melalui pelatihan khusus, pendekatan berbasis kebutuhan individu, kerja sama lintas-sektor dan lintas-lembaga, integrasi pendekatan inklusi dalam program dan kegiatan, pembentukan jaringan dan komunitas yang mendukung, serta evaluasi yang terus-menerus, Desa Luran dapat menjadi contoh yang baik dalam memberikan dukungan yang sesuai dan bermartabat bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan menghormati hak-hak semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Mendorong Inklusi Aktif Penyandang Disabilitas dalam Kehidupan

Dalam konteks Desa Luran di Ambon, mendorong inklusi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan menghargai keberagaman. Inklusi aktif ini meliputi memberikan kesempatan yang setara dalam hal pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik. Dengan mempromosikan inklusi

aktif, kita tidak hanya membangun masyarakat yang inklusif secara struktural, tetapi juga menghargai dan memperkaya keberagaman yang ada di Desa Luran.

Pertama-tama, penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Desa Luran. Ini mencakup penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi secara holistik. Misalnya, sekolah-sekolah harus memiliki infrastruktur yang ramah disabilitas, guru dan tenaga pendidik yang terlatih dalam pendekatan inklusif, serta kurikulum yang mendukung keberagaman dan kebutuhan individu. Dengan demikian, setiap siswa, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan mendukung pengembangan potensi mereka (Probosiwi, 2017).

Studi kasus di Desa Luran dapat melibatkan pendekatan kolaboratif antara sekolah, pemerintah desa, lembaga pendidikan khusus, dan keluarga penyandang disabilitas. Misalnya, pemerintah desa dapat memberikan dukungan infrastruktur bagi sekolah-sekolah untuk membuat lingkungan belajar yang inklusif, sementara lembaga pendidikan khusus memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada guru dan tenaga pendidik. Selain itu, keluarga penyandang disabilitas juga perlu terlibat aktif dalam proses pendidikan anak mereka, termasuk dalam penyusunan program pendidikan individual yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka.

Selanjutnya, dalam hal pekerjaan, Desa Luran perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung akses yang setara terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini meliputi penyediaan pelatihan keterampilan, penyesuaian lingkungan kerja, serta promosi peluang pekerjaan yang inklusif dan adil. Misalnya, perusahaan-perusahaan lokal dapat menerapkan program pelatihan keterampilan khusus untuk penyandang disabilitas, sementara pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perusahaan

yang mempekerjakan penyandang disabilitas (Probosiwi, 2017).

Studi kasus ini dapat melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, perusahaan-perusahaan lokal, lembaga pelatihan keterampilan, dan organisasi advokasi disabilitas. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif pajak atau bantuan teknis untuk perusahaan yang menerapkan kebijakan inklusi dalam rekrutmen tenaga kerja. Lembaga pelatihan keterampilan juga dapat berperan penting dalam memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal kepada penyandang disabilitas. Sementara itu, organisasi advokasi disabilitas dapat memberikan dukungan informasi dan bimbingan kepada penyandang disabilitas yang mencari pekerjaan.

Selain dari aspek pendidikan dan pekerjaan, inklusi aktif juga melibatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik. Di Desa Luran, penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap kegiatan sosial dan budaya di masyarakat. Ini mencakup penyediaan aksesibilitas fisik dan komunikasi yang memadai dalam tempat-tempat umum, serta promosi budaya inklusif yang menghargai keberagaman.

Dalam hal politik, inklusi aktif juga berarti memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan advokasi kebijakan yang relevan. Studi kasus di Desa Luran dapat melibatkan pembentukan forum atau kelompok advokasi disabilitas yang memiliki peran dalam menyuarakan kepentingan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, pemerintah desa dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan advokasi bagi penyandang disabilitas yang ingin terlibat dalam aktivitas politik (Probosiwi, 2017).

Selain dari aspek praktis, penting juga untuk memperhatikan aspek budaya dan psikososial dalam mendorong inklusi aktif

penyandang disabilitas. Ini meliputi upaya untuk menghapus stigma dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat terhadap penyandang disabilitas, serta membangun kesadaran dan empati di kalangan masyarakat luas. Misalnya, melalui kampanye edukasi dan advokasi, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan potensi penyandang disabilitas, serta mendorong sikap yang inklusif dan menghargai keberagaman dalam masyarakat.

Dengan demikian, melalui upaya mendorong inklusi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat di Desa Luran, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan menghargai keberagaman. Hal ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, perusahaan-perusahaan lokal, organisasi advokasi disabilitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah konkret seperti penyediaan akses yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan, partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, serta promosi budaya inklusif, Desa Luran dapat menjadi contoh yang baik dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai hak-hak semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Penerimaan Masyarakat kepada Penyandang Disabilitas

Penerimaan sosial adalah proses di mana individu diakui dan diterima oleh kelompok sosial atau masyarakat di mana mereka berada. Masyarakat sendiri merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam hal budaya dan bahasa. Ini mencakup berbagai jenis manusia yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, serta saling mendukung untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perlakuan yang merugikan satu sama lain (Murwaningsih & Wedjajati, 2021).

Dalam menerima keberagaman dan kekurangan orang lain, seringkali terjadi pro dan kontra dari masyarakat secara luas. Beberapa orang mungkin memiliki

pandangan positif dan menerima orang lain tanpa memandang perbedaan, sementara yang lain mungkin memiliki sikap yang berbeda dan sulit menerima kekurangan atau perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki sikap yang terbuka dan relasi yang inklusif terhadap orang lain dengan berbagai kondisi yang mereka miliki (Murwaningsih & Wedjajati, 2021).

Masyarakat inklusi adalah konsep yang menekankan pentingnya terbuka, universal, dan ramah bagi semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, ideologi, atau kondisi fisik. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, dan memiliki hak untuk diterima dan diakui oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian (Murwaningsih & Wedjajati, 2021).

Dalam konteks desa, konsep masyarakat inklusi menjadi sangat relevan dan penting. Desa yang mengadopsi prinsip masyarakat inklusi akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua warganya. Ini berarti bahwa setiap individu, termasuk mereka yang mungkin memiliki kekurangan atau perbedaan, diakui, dihormati, dan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat inklusi di desa membuka pintu bagi kolaborasi antarwarga yang beragam, mempromosikan kerja sama, dan mendorong pembentukan hubungan yang saling menghargai. Ini juga menciptakan ruang bagi dialog terbuka dan pengertian yang lebih baik antara individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Dalam masyarakat inklusi, nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi dasar dalam interaksi dan hubungan antarwarga. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa kebersamaan yang kuat di dalam desa, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mempromosikan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Dengan demikian, konsep masyarakat inklusi bukan hanya sekadar aspirasi, tetapi juga merupakan

landasan yang kuat untuk membangun desa yang berkelanjutan, adil, dan berdaya.

Di desa inklusif, baik masyarakat dengan disabilitas maupun tanpa disabilitas dapat berinteraksi dengan saling menghargai keunikan dan keistimewaan masing-masing individu. Interaksi ini tidak terlepas dari keberadaan individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sangat menonjol, yang seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Namun, penerimaan sosial yang terjadi di masyarakat inklusif adalah ketika individu diakui dan diterima oleh kelompok sosial atau masyarakat tanpa memandang fisik, etnis, suku, atau latar belakang lainnya (Probosiwi, 2017).

Penerimaan ini menghasilkan lingkungan di mana individu-individu dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dapat hidup dengan diterima secara adil dan ramah dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk menjalankan hak-haknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya tanpa tekanan atau paksaan, yang pada gilirannya mengarah pada terciptanya interaksi sosial yang harmonis dan positif di masyarakat. Dalam konteks desa inklusif, penerimaan sosial membawa dampak positif dalam memperkuat kohesi sosial, mengurangi stigma, dan mendorong partisipasi aktif dari semua warga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya penerimaan yang luas dan inklusif, desa menjadi tempat yang lebih ramah, adil, dan berdaya bagi semua individu, sehingga menciptakan kondisi yang mendukung bagi perkembangan individu dan kemajuan bersama.

Di desa Luran Ambon, langkah-langkah konkret dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kelompok sosial dan aktivitas masyarakat. Langkah pertama adalah memastikan adanya kelompok-kelompok sosial yang terbuka dan inklusif di tingkat desa, seperti Kelompok PKK, karang taruna, kelompok tani, dan lainnya. Desa juga dapat mendorong pembentukan kelompok-kelompok baru yang

melibatkan penyandang disabilitas, misalnya kelompok seni atau olahraga inklusif.

Selanjutnya, perlu ada inisiatif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat ikut serta dalam aktivitas kelompok sosial tersebut secara aktif dan merata. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan, seperti aksesibilitas fisik, bantuan teknologi komunikasi, atau dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Dalam konteks kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di desa, perlu ditekankan bahwa partisipasi aktif penyandang disabilitas tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka secara individual, tetapi juga untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama di desa. Dengan memperkuat inklusi sosial dan mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat, desa Luran Ambon dapat menjadi lebih inklusif, ramah, dan berdaya bagi semua warganya.

Penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas sama-sama dapat belajar bagaimana menghadapi dan menghargai satu sama lain dalam berkarya dan berinteraksi di masyarakat. Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam hal berinteraksi dengan masyarakat luas. Salah satu kendala tersebut adalah terkait dengan mobilitas gerak dan keterbatasan fisik yang mengharuskan mereka dibantu oleh orang lain untuk berpindah tempat. Contohnya, penyandang disabilitas daksa berat tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengikuti kegiatan kelompok sosial (Probosiwi, 2017)..

Penyandang disabilitas dengan kategori yang berat sering menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal mobilitas dan

ruang gerak. Beberapa di antara mereka bahkan mengalami keterbatasan fisik yang sangat memprihatinkan, sehingga mereka memerlukan ruangan khusus untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti tidur, makan, dan kegiatan lainnya. Meskipun demikian, mereka masih ingin aktif bergabung dalam kelompok sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (Probosiwi, 2017).

Dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik yang signifikan seperti sulitnya bergerak atau berkomunikasi secara langsung, sering menggunakan teknologi seperti telepon seluler untuk tetap terhubung dengan kelompok sosial dan lingkungan sekitarnya. Meskipun ada hambatan-hambatan seperti itu, banyak keluarga dan masyarakat yang tetap menerima dan mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kelompok sosial.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam kelompok sosial membuktikan bahwa mereka tidak hanya ingin diterima secara sosial, tetapi juga ingin memberikan kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat. Meskipun ada tantangan dan hambatan dalam prosesnya, kehadiran mereka di dalam kelompok sosial merupakan langkah penting dalam memperkuat inklusi sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan adil bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas (Probosiwi, 2017)..

Pada akhirnya, keberadaan penyandang disabilitas dalam kelompok sosial masyarakat membawa dampak positif dalam membentuk relasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Meskipun masih ada sebagian kecil masyarakat yang mungkin kesulitan menerima atau memahami kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas secara baik, namun upaya untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan kerjasama antara penyandang disabilitas dan masyarakat luas perlu terus dilakukan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kehidupan bermasyarakat dapat berjalan

dengan lebih harmonis dan berkeadilan bagi semua warganya, tanpa terkecuali.

Proses Adaptasi Penyandang Disabilitas

Proses adaptasi atau penyesuaian merupakan langkah yang penting bagi penyandang disabilitas untuk mencapai harmoni dengan diri sendiri dan lingkungannya. Ini adalah sebuah perjalanan yang melibatkan usaha dalam menemukan keseimbangan hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Proses adaptasi ini berlangsung sepanjang kehidupan dan melibatkan upaya untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang muncul, guna mencapai hidup yang sehat dan produktif (Dynaindar & Priyono, 2022).

Bagi penyandang disabilitas, menyesuaikan diri dengan kelompok sosial dan lingkungan sekitar merupakan suatu tantangan yang tidak mudah. Keterbatasan fisik atau mental sering kali membuat mereka harus mengikuti kesepakatan bersama dalam kelompok sosial, serta membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi untuk bergabung dan berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain. Percaya diri adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bergaul dengan lingkungan sosial (Hakim et al., 2023).

Proses adaptasi ini sering kali dimulai dari titik terendah, di mana penyandang disabilitas merasa terpuruk akibat perubahan kondisi fisiknya. Namun, dengan menerima kondisi tersebut dengan lapang dada, mereka dapat membangun keyakinan bahwa masih mampu dan berharga, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya. Ini bukan hanya sebuah perjalanan pribadi, tetapi juga merupakan hal yang sering dialami oleh banyak individu, termasuk mereka yang tidak memiliki disabilitas fisik (Hakim et al., 2023)..

Salah satu aspek penting dalam proses adaptasi ini adalah dukungan dari keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat besar

dalam memberikan motivasi, dukungan emosional, dan keyakinan kepada penyandang disabilitas untuk tetap percaya pada diri sendiri. Dengan kata-kata penyemangat, perhatian, dan keberanian untuk menghadapi tantangan bersama, keluarga dapat membantu membangun rasa percaya diri yang kuat pada penyandang disabilitas.

Selain itu, penghargaan terhadap keputusan dan pendapat yang diungkapkan oleh penyandang disabilitas juga sangat penting. Hal ini membantu mereka merasa dihargai, bermanfaat, dan termotivasi untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kelompok masyarakat. Keluarga yang memberikan dukungan dan dorongan pada penyandang disabilitas juga dapat membantu mereka menyesuaikan diri lebih baik dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Proses menyesuaikan diri ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari berkenalan dan berbaur dengan anggota kelompok, menghilangkan rasa malu, hingga membuka diri untuk masuk ke dalam kelompok sosial. Interaksi dengan tetangga dan lingkungan sekitar juga menjadi langkah penting dalam proses adaptasi ini. Meskipun tidak selalu mudah dan cepat, penyandang disabilitas memiliki kekuatan dan potensi yang dapat membantu mereka untuk terus berkembang dan berinteraksi secara positif dengan masyarakat (Putri, 2024).

Selain itu, masyarakat juga perlu memahami karakteristik dan sikap penyandang disabilitas dalam menyesuaikan diri. Mereka yang memiliki sifat ramah, mudah bergaul, dan memiliki kelebihan tersendiri seringkali dapat dengan mudah bergabung dan berbaur dengan anggota kelompok sosial maupun masyarakat. Pendapat dan ide yang mereka sampaikan juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memecahkan masalah dan membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

Kesimpulannya, proses adaptasi atau penyesuaian bagi penyandang disabilitas merupakan perjalanan yang kompleks namun penting dalam mencapai keharmonisan

dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dukungan dari keluarga, penghargaan dari masyarakat, serta keyakinan pada potensi diri sendiri menjadi faktor-faktor kunci dalam membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan bergaul secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Mengatasi Stigma Disabilitas Dengan Pemberdayaan BUMDES di Desa Luran Ambon

Sejak 1997, Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang No.4 Tahun 1997. Pada masa itu, pandangan terhadap penyandang disabilitas sering kali bersifat paternalistik, di mana mereka sering kali dianggap sebagai objek kasihan karena keterbatasan kesehatannya. Namun, pada tahun 2007, Indonesia mulai mengambil langkah-langkah lebih progresif dengan menjadi pihak yang menandatangani Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pada tahun 2011, langkah ini semakin ditegaskan ketika pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Langkah terbaru yang diambil adalah pada tahun 2016, di mana Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 direvisi menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Revisi ini menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih humanis, dengan memasukkan sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar kebijakan terhadap penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, perjalanan kebijakan Indonesia dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas telah mengalami evolusi yang signifikan dari pandangan paternalistik menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis HAM.

Meskipun program pemberdayaan dianggap sebagai salah satu solusi utama dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat penyandang disabilitas, namun sebagian besar program

yang dijalankan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang. Pelaksanaan program pemberdayaan terhadap disabilitas cenderung bersifat pragmatis dan umum, hanya menyentuh permukaan dari permasalahan yang sebenarnya. Perspektif yang digunakan dalam program-program tersebut sering kali masih memandang penyandang disabilitas sebagai objek yang perlu dikasihani, yang pada akhirnya dapat menyebabkan mereka menjadi tergantung secara mental (Thohari, 2014).

Dalam realitasnya, melihat kebutuhan yang sangat spesifik dari masyarakat penyandang disabilitas, penanganan mereka di pedesaan seharusnya dijalankan dengan strategi yang lebih khusus dan sesuai dengan potensi serta kondisi unik dari setiap individu penyandang disabilitas tersebut. Hal ini mengingat bahwa kondisi di setiap desa dan kondisi masing-masing penyandang disabilitas dapat sangat bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Meskipun program pemberdayaan dianggap sebagai salah satu solusi utama dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat penyandang disabilitas, namun sebagian besar program yang dijalankan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang. Pelaksanaan program pemberdayaan terhadap disabilitas cenderung bersifat pragmatis dan umum, hanya menyentuh permukaan dari permasalahan yang sebenarnya. Perspektif yang digunakan dalam program-program tersebut sering kali masih memandang penyandang disabilitas sebagai objek yang perlu dikasihani, yang pada akhirnya dapat menyebabkan mereka menjadi tergantung secara mental (Mulyanah, 2021).

Dalam realitasnya, melihat kebutuhan yang sangat spesifik dari masyarakat penyandang disabilitas, penanganan mereka di pedesaan seharusnya dijalankan dengan strategi yang lebih khusus dan sesuai dengan potensi serta kondisi unik dari setiap individu

penyandang disabilitas tersebut. Hal ini mengingat bahwa kondisi di setiap desa dan kondisi masing-masing penyandang disabilitas dapat sangat bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. (Mulyanah, 2021)

Kebijakan di tingkat desa memberikan peluang untuk mengarahkan dana desa serta mendirikan lembaga ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan tujuan pemberdayaan penyandang disabilitas. Permendes No. 22 Tahun 2016 Pasal 7 menegaskan bahwa penggunaan dana desa memiliki prioritas tertentu, salah satunya adalah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan pengelolaan layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marginal, serta anggota masyarakat desa yang merupakan penyandang disabilitas (ASASANDI, 2018).

Selain itu, dana desa juga dapat dialokasikan untuk mendukung pengelolaan usaha ekonomi produktif dan penyediaan modal yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama. Hal ini membuka peluang bagi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di tingkat desa, dengan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal dan mengembangkan potensi ekonominya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan akses lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan sosial dasar, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjadi aktor yang aktif dalam pengembangan ekonomi lokal di lingkungan mereka (ASASANDI, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Smeru menyoroti pentingnya peran desa sebagai lingkungan komunitas terdekat bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah memanfaatkan dana desa sebagai sumber daya yang potensial untuk mendukung upaya

pemberdayaan penyandang disabilitas, membangun infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas, serta mengurangi stigma yang masih melekat pada mereka. Dengan menggunakan dana desa secara efektif, dapat diciptakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat desa. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas juga menjadi fokus penting, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas umum dan layanan sosial dengan lebih mudah dan nyaman (Probosiwi, 2017).

Penggunaan dana desa untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas juga dapat berdampak positif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering kali dihadapi oleh mereka. Dengan adanya dukungan dari tingkat desa, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima dan menghargai keberadaan serta kontribusi yang diberikan oleh penyandang disabilitas dalam pembangunan dan kehidupan sosial di desa.

Desa Luran Ambon, pemerintah desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan sejumlah kelompok, termasuk masyarakat lanjut usia, ibu hamil, masyarakat Pra-Keluarga Miskin (PMKS), dan penyandang disabilitas. Pendanaan untuk program pemberdayaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang sumbernya mencakup Dana Desa dan pendapatan dari berbagai kegiatan usaha desa, seperti sewa lahan, hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan lainnya.

Pada tahun 2017, pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp 200 juta secara khusus untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyediaan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan buku saku pendamping disabilitas. Selain itu, dana juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas, seperti guiding block, fasilitas akses disabilitas di kantor desa, dan balai latihan kerja.

Semua informasi terkait program pemberdayaan, alokasi dana, dan hasil kegiatan dapat ditemukan lebih lanjut melalui website resmi pemerintah Desa Luran Ambon. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas.

Desa Luran Ambon menjadi sorotan sebagai desa inklusif yang mengutamakan aksesibilitas dan pelayanan setara bagi penyandang disabilitas. Desa ini dianggap sebagai salah satu desa paling ramah terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, karena berbagai upayanya dalam memfasilitasi aksesibilitas di kantor desa dan menyediakan buku panduan layanan khusus untuk pendampingan penyandang disabilitas. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa mengabaikan keterbatasan yang dimiliki. Dengan adanya infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas, seperti aksesibilitas di kantor desa, dan adanya panduan layanan yang khusus, mereka dapat mengakses pelayanan publik dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan dengan lebih mudah dan nyaman.

Desa Luran Ambon menjadi contoh yang inspiratif bagi desa-desa lain di Indonesia dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah konkret seperti ini membantu mengurangi hambatan akses bagi mereka dan meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Di Desa Luran Ambon, jumlah penyandang disabilitas mencapai 253 orang dari total penduduk sebanyak 28.501 jiwa. Mereka terbagi menjadi 17 orang tuna netra, 38 orang tuna rungu atau wicara, 52 orang tuna daksa, 124 orang tuna grahita, dan 60 orang cacat ganda. Penyebab kecacatan di desa ini bervariasi, mulai dari faktor keturunan, kecelakaan, hingga dampak dari bencana alam. Akibatnya, beberapa penyandang disabilitas sebelumnya telah

memiliki pekerjaan dan keahlian, namun menjadi penyandang disabilitas setelah mengalami musibah.

Pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan secara partisipatif, yang berarti melibatkan penyandang disabilitas dalam menentukan kebutuhan mereka (bottom-up), tetapi keputusan akhir dan program diambil secara top-down oleh kepala desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pertimbangan utama adalah fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas sebagai individu yang layak. Pemberdayaan tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti sarana dan prasarana, tetapi juga memperhatikan dimensi mental mereka sebagai anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan akan aktualisasi diri dan kesempatan kerja.

Di Desa Luran Ambon, partisipasi masyarakat disabilitas dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi hal yang signifikan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa Musrenbangdes merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan desa untuk berdiskusi dan menyetujui program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan kemajuan desa. Proses ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam berkolaborasi untuk merencanakan upaya pemajuan desa.

Di Desa Luran Ambon, penyandang disabilitas menjadi bagian yang aktif dalam Musrenbangdes. Mereka turut serta memberikan masukan dan saran terkait program dan pembangunan desa, serta melakukan pemetaan kebutuhan yang spesifik untuk memfasilitasi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen desa untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki suara yang didengar dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat disabilitas dalam Musrenbangdes dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi

mereka tercakup dalam upaya pemajuan desa secara menyeluruh.

Contoh lain yang dapat menjadi inovasi pemberdayaan yang dapat ditiru oleh Desa Luran Ambon adalah Pada tahun 2017, BUMDesa memperluas unit usahanya dengan mendirikan Kampoeng Matraman, sebuah layanan wisata yang menawarkan edukasi dan kuliner dengan konsep budaya Jawa yang memperlihatkan Desa Luran Ambon sebagai destinasi wisata. Di dalam Kampoeng Matraman, terdapat layanan akomodasi seperti penginapan dan sarana pertemuan yang ditawarkan kepada pengunjung. Selain itu, dalam operasional Kampoeng Matraman, diadakan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan Penyandang Disabilitas. BUMDesa Panggung Lestari melaksanakan program pemberdayaan dengan berkolaborasi bersama komunitas penyandang disabilitas yang sudah berdiri, yaitu Difcom (Difable and Friends Community). Untuk mendukung kegiatan komunitas ini, BUMDesa menyediakan ruangan khusus berupa fasilitas sanggar untuk mengadakan kegiatan seperti pertunjukan seni (teater, musik, tari, musik band) serta tempat untuk memamerkan karya seni mereka seperti lukisan atau ukiran.

Prakarsa ini mendorong para penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam kegiatan berkelompok dan organisasi, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, maupun evaluasi. Keterlibatan aktif ini tidak terlepas dari dukungan tokoh-tokoh kunci di masyarakat (local champion) serta kesediaan masyarakat disabilitas untuk terlibat secara langsung. Ini menggambarkan bahwa melalui fasilitasi yang tepat, mereka dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam berbagai aspek organisasi dan kegiatan yang mereka ikuti.

Kepala Desa di Luran Ambon memegang peran kunci sebagai Local Champion yang menggerakkan pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Perannya sebagai pemimpin dalam tata kelola desa tidak hanya terbatas pada memfasilitasi masyarakat disabilitas dengan menyediakan ruang sanggar untuk pertemuan dan diskusi

mereka. Kepala Desa juga menjadi inisiator yang memberikan rekomendasi kepada BUMDesa untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Sebagai pemimpin lokal, Kepala Desa secara tidak langsung mendorong kemunculan Local Champions baru, terutama di kalangan masyarakat disabilitas. Bila kita mengacu pada tiga peran Local Champion seperti yang dijelaskan oleh Haven-Tang Joes dan Xu, maka Kepala Desa telah memainkan peran sebagai fasilitator, mediator, dan mobilisator. Contoh konkretnya adalah praktik pengembangan modal sosial dengan pendekatan kolektif, kesadaran kolektif, dan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Faktor kepemimpinan Kepala Desa menjadi kunci dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, masyarakat disabilitas didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan dan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengaktualisasikan potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan desa (Ndaumanu, 2020).

Local champion dalam konteks penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon mengemban peran yang sangat signifikan sebagai mediator dan mobilisator. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh Haven-Tang dan Xu, menggambarkan peran penting mereka dalam menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan menggerakkan perubahan positif di komunitas mereka (Syobah, 2018).

Sebagai mediator, local champion di Desa Luran Ambon menjadi penghubung utama antara penyandang disabilitas dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan dan fasilitas untuk memajukan kehidupan mereka. Salah satu wujud nyata dari peran ini adalah terbentuknya komunitas Difcom yang diprakarsai oleh penyandang disabilitas sendiri. Difcom menjadi wadah bagi mereka untuk saling berbagi pengalaman, mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, dan mencari solusi bersama.

Melalui peran sebagai mediator, local champion juga menjadi jembatan antara komunitas disabilitas dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDesa. Mereka membantu memfasilitasi dialog, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan komunitas, serta menjembatani pelaksanaan program pemberdayaan yang diperlukan (Syobah, 2018).

Selain menjadi mediator, peran yang lebih dominan yang dijalankan oleh local champion di Desa Luran Ambon adalah sebagai mobilisator. Sebagai mobilisator, mereka tidak hanya bertindak sebagai penghubung, tetapi juga sebagai inisiator perubahan yang mendorong komunitas disabilitas untuk aktif terlibat dalam pembangunan diri mereka sendiri. Inisiatif ini bukan hanya datang dari luar, tetapi berasal dari komunitas disabilitas itu sendiri, menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang proaktif.

Peran mobilisator local champion tercermin dalam kegiatan mereka untuk membangun gerakan sosial di dalam komunitas. Mereka menggerakkan masyarakat disabilitas untuk bersatu, bekerja sama, dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Misalnya, mereka membantu dalam mengorganisir acara-acara sosial dan budaya yang melibatkan penyandang disabilitas, seperti pertunjukan seni, pelatihan keterampilan, atau kegiatan penggalangan dana untuk mendukung kebutuhan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Smeru juga menyoroti pentingnya peran local champion dalam menciptakan desa inklusif bagi penyandang disabilitas. Local champion, atau SDM penggerak di desa, memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat disabilitas. Mereka tidak hanya berperan sebagai perwakilan, tetapi juga sebagai advokat dan advokat yang gigih dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi komunitas mereka (Probosiwi, 2017).

Dalam konteks Desa Luran Ambon, local champion bukan hanya menjadi figur

pemimpin atau tokoh penting, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun kesadaran kolektif dan semangat kemandirian di kalangan penyandang disabilitas. Melalui peran mereka yang beragam sebagai mediator, mobilisator, fasilitator, dan advokat, local champion memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, berdaya guna, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Ini juga menggambarkan bagaimana kekuatan individu dan komunitas dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dan memajukan kesejahteraan bersama.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan yang dijalankan oleh BUMDesa di Desa Luran Ambon memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari pola pemberdayaan biasa. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas seringkali hanya dianggap sebagai objek pemberdayaan, di mana mereka hanya menjadi penerima bantuan atau manfaat tanpa dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan program tersebut. Namun, pendekatan yang diadopsi oleh BUMDesa jauh lebih inklusif dan partisipatif.

Kunci dari pendekatan ini adalah penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai perencana dan pengelola manfaat. Mereka diberikan kesempatan untuk merencanakan kegiatan, mengembangkan karya, dan bahkan bekerja dalam tata kelola organisasi untuk mengembangkan unit usaha. Ini menjadikan mereka memiliki posisi yang lebih kuat dan bermakna dalam program pemberdayaan, bukan hanya sebagai penerima tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam memajukan diri mereka sendiri serta komunitasnya.

Selain itu, peran penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan BUMDesa tidak hanya terbatas pada level operasional (hilir), di mana mereka dilibatkan sebagai karyawan atau tenaga kerja. Namun, keterlibatan mereka menyeluruh, mulai dari level strategis (hulu), di mana mereka turut

serta dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan program secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan semangat inklusi yang kuat, di mana semua anggota komunitas diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam level strategis juga dapat dilihat dari dampak positifnya terhadap pembangunan dan pertumbuhan organisasi. Dengan adanya perspektif yang beragam dan inklusif, program-program yang dijalankan menjadi lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Penyandang disabilitas membawa pengalaman hidup dan pandangan unik yang dapat memperkaya gagasan dan solusi yang diusulkan (Murwaningsih & Wedjajati, 2021).

Selain itu, melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan program pemberdayaan juga memberikan mereka rasa memiliki dan nilai yang lebih tinggi. Mereka bukan hanya pasif menerima bantuan, tetapi aktif berkontribusi dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan program tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri, otonomi, dan kemandirian mereka dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang (Probosiwi, 2017).

Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan oleh BUMDesa tidak hanya menciptakan pemberdayaan yang holistik dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga merangsang perkembangan potensi dan kreativitas mereka. Ini memberikan contoh yang inspiratif bagi pemberdayaan masyarakat yang lebih luas, di mana inklusi dan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Diana Conyers mengemukakan tiga argumen yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan komunitas. Pertama, partisipasi masyarakat dianggap sebagai

salah satu kunci keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Hal ini karena melalui partisipasi, pihak yang terlibat dalam proyek dapat memperoleh informasi yang sangat berharga terkait dengan kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat. Dengan demikian, partisipasi menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan, yang kemudian dapat digunakan untuk merancang program atau kegiatan yang lebih sesuai dan berdaya guna bagi komunitas tersebut (Conyers, 2021).

Kedua, adanya partisipasi masyarakat juga berdampak pada peningkatan kepercayaan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses persiapan dan perencanaan proyek, hal ini akan menciptakan rasa memiliki yang lebih tinggi terhadap proyek tersebut. Dengan merasa memiliki, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mendukung dan berkontribusi secara positif dalam pelaksanaan proyek tersebut. Hal ini terutama relevan dalam konteks negara berkembang, di mana keberhasilan proyek pembangunan seringkali sangat tergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat (Conyers, 2021).

Ketiga, partisipasi masyarakat juga dianggap penting karena merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pembangunan. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pembangunan, hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengartikulasikan kebutuhan, aspirasi, dan harapan mereka. Dengan demikian, partisipasi menjadi sarana yang efektif untuk menjamin bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat terpenuhi dalam setiap tahap pembangunan (Conyers, 2021).

Secara keseluruhan, argumen-argumen yang diajukan oleh Diana Conyers menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan komunitas. Partisipasi tidak hanya sebagai alat untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk konkrit dari pemenuhan hak-hak masyarakat

dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap proyek atau program pembangunan, terutama di lingkungan yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh anggota komunitas.

Partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan memberikan dua jenis manfaat yang signifikan bagi penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon, yaitu keuntungan ekonomi (profit) dan manfaat sosial (benefit). Keuntungan ekonomi ini terwujud dalam bentuk penghasilan dari pekerjaan contohnya seniman. Meskipun beberapa dari mereka mengakui bahwa penghasilan yang diperoleh belum cukup untuk secara substansial meningkatkan status ekonomi mereka, namun pendapatan ini dianggap membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Penghasilan dari kegiatan seni sebagai bentuk keuntungan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon. Hal ini merupakan hasil dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan seni, seperti pertunjukan teater, musik, tari, dan seni lainnya yang mereka tampilkan. Meskipun penghasilan ini mungkin belum mencukupi untuk memberikan kesejahteraan yang optimal, namun hal ini dianggap sebagai kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Selain keuntungan ekonomi, penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon juga merasakan manfaat sosial yang signifikan dari partisipasi mereka dalam kegiatan pemberdayaan. Salah satu manfaat utama adalah diterimanya mereka sebagai bagian yang aktif terlibat dalam upaya meningkatkan potensi Desa Panggungharjo. Sebelum mereka terlibat dalam kegiatan desa, termasuk melalui BUM Desa atau pertunjukan seni, kondisi penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon serupa dengan fenomena yang terjadi pada penyandang disabilitas pada umumnya, yaitu sering kali mengalami diskriminasi dari masyarakat sekitar.

Diskriminasi ini tidak hanya terwujud dalam perlakuan yang tidak adil, tetapi juga dalam bentuk julukan-julukan yang tidak pantas dan merendahkan. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang tidak inklusif dan menghambat kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Namun, kondisi ini berangsur berubah sejak adanya upaya pemberdayaan melalui pendirian sanggar seni dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan desa.

Dengan menjadi bagian dari kegiatan pemberdayaan, penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon merasa diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai kontributor yang berharga dalam pembangunan komunitas. Mereka diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi dan bakat mereka melalui berbagai pertunjukan seni, serta berperan dalam pengelolaan kegiatan di BUM Desa. Hal ini memberikan mereka rasa harga diri, rasa memiliki, dan motivasi untuk terus berkontribusi positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan inklusi bagi penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon.

Penelitian yang dilakukan oleh Purinami mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka dalam berinteraksi di masyarakat. Melalui pekerjaan, mereka mendapatkan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan memperluas jaringan sosial mereka, meningkatkan kemandirian, serta mengembangkan peran sosial lainnya. Selain itu, bekerja juga penting bagi mereka dalam meraih kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan, yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat eksistensi diri mereka (Apsari & Mulyana, 2018).

Konteks pemberdayaan yang dilakukan di Desa Luran Ambon sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (empowerment) yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Prinsip dasar dari

empowerment adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar dapat mandiri dan menentukan arah hidup mereka sendiri dalam kelompok atau komunitasnya.

Dalam teori pemberdayaan masyarakat, ditekankan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki potensi yang sama, meskipun kadang-kadang potensi tersebut tidak disadari atau tidak diekspresikan secara eksplisit. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kemampuan kepada masyarakat untuk mengenali dan menggunakan potensi tersebut secara efektif (Faizal, 2017).

Partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, seperti yang terjadi di Desa Luran Ambon, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk merasakan dampak positif dari empowerment. Mereka dapat melihat diri mereka sebagai bagian yang aktif dan berharga dalam pembangunan komunitas, bukan hanya sebagai objek penerima bantuan. Melalui pekerjaan dan keterlibatan dalam kegiatan sosial, mereka dapat mengembangkan keterampilan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Desa Luran Ambon mengakui bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi untuk berkembang dan berperan dalam masyarakat. Melalui upaya pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan bahwa penyandang disabilitas dapat lebih mandiri, aktif, dan diakui secara lebih luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Model pemberdayaan yang diterapkan di Desa Luran Ambon telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam kemandirian dan eksistensi penyandang disabilitas. Dengan adanya kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan sebagai seniman, mereka merasa lebih mandiri dan diakui sebagai bagian yang berkontribusi secara positif

dalam pembangunan komunitas. Pemberdayaan ini tidak hanya sekadar memberikan pekerjaan atau penghasilan, tetapi juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengekspresikan diri sepenuhnya, dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimiliki.

Keberhasilan pemberdayaan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek pemberdayaan juga tercermin dalam kemampuan mereka untuk menampilkan jati diri secara utuh. Mereka tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, tetapi juga mampu menginspirasi masyarakat sekitar untuk beradaptasi dengan keterbatasan yang mereka miliki. Adanya kesempatan untuk aktualisasi diri dalam program pemberdayaan yang dijalankan oleh BUMDesa Panggung Lestari telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengubah stigma masyarakat di Desa Luran Ambon terhadap penyandang disabilitas.

Masyarakat Desa Luran Ambon kini menerima kehadiran penyandang disabilitas dengan sikap yang sama seperti terhadap masyarakat lainnya, tanpa melakukan perbedaan atau diskriminasi. Mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa seperti kerja bakti, musyawarah, dan kegiatan lainnya. Bahkan, di beberapa sekolah dasar, mereka bahkan dijadikan sebagai guru dalam membina kegiatan ekstrakurikuler seni dan budaya. Hal ini menunjukkan pergeseran besar dalam sikap dan perilaku masyarakat terhadap penyandang disabilitas sejak mereka terlibat dalam program pemberdayaan dan kegiatan lainnya di Desa Luran Ambon.

Sebelumnya, penyandang disabilitas di Desa Luran Ambon seringkali mengalami intimidasi, pelecehan, atau tindakan diskriminasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah tidak dicantumkannya atau didaftarkanya penyandang disabilitas sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK). Namun, melalui upaya pemberdayaan dan inklusi yang dilakukan, kondisi ini berangsur-angsur

berubah menjadi penerimaan dan dukungan penuh dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas, memastikan bahwa hak dan martabat mereka diakui secara merata dalam kehidupan sosial dan kegiatan masyarakat di Desa Luran Ambon.

Aspek kemandirian menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membawa unsur-unsur yang dapat meningkatkan martabat dan harkat hidup manusia, serta membantu mereka keluar dari kondisi ketergantungan yang dapat menghambat kemajuan dan mengakibatkan kemiskinan serta keterbelakangan. Dengan kata lain, tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk memandirikan masyarakat.

Penerapan strategi pemberdayaan dapat dicapai melalui implementasi proses yang terarah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program pemberdayaan. Pendekatan yang mendasari konsep atau strategi pemberdayaan adalah melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat di Desa Luran Ambon berfokus pada peningkatan kemandirian mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Masyarakat didorong untuk mengambil peran aktif dalam menentukan arah pembangunan dan mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, program pemberdayaan di Desa Luran Ambon berupaya untuk membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, merumuskan solusi yang sesuai,

dan mengimplementasikan tindakan yang efektif untuk mencapai perubahan yang positif.

Sebagai contoh, program pemberdayaan di Desa Luran Ambon tidak hanya fokus pada memberikan bantuan finansial atau pelatihan keterampilan, tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi antarwarga. Dengan demikian, konsep pemberdayaan yang diterapkan di Desa Luran Ambon bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan mandiri masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan komunitasnya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama yang menjadi landasan bagi keberhasilan program tersebut. Pertama, pendekatan yang terarah dan terfokus. Hal ini mengacu pada upaya yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terukur, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki arah yang jelas menuju pencapaian tujuan pemberdayaan.

Kedua, program pemberdayaan harus melibatkan dan diikutsertakan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci utama. Hal ini mencakup pengenalan masalah, penentuan solusi, serta pelaksanaan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga, pemberdayaan menggunakan pendekatan kelompok. Pendekatan ini mengakui bahwa pemberdayaan akan lebih berhasil jika dilakukan secara kolektif dalam kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dengan berkolaborasi dan bekerja bersama dalam kelompok, masyarakat dapat saling

mendukung, berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta memperkuat solidaritas antaranggota kelompok.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Luran Ambon menjadi salah satu contoh yang sukses dalam penerapan pendekatan-pendekatan tersebut. Program pemberdayaan yang dilakukan di desa tersebut telah terbukti efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Keberhasilan Desa Luran Ambon dalam pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari komitmen dan partisipasi aktif masyarakat serta pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan pendekatan yang terarah, partisipatif, dan menggunakan pendekatan kelompok, Desa Luran Ambon mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemandirian masyarakat secara holistik.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar memberikan bantuan atau pelatihan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Desa Luran Ambon menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan yang telah terbukti berhasil dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Desa Luran, Ambon, memiliki potensi besar untuk menjadi contoh yang luar biasa dalam membangun masyarakat yang menghargai diversitas penyandang disabilitas dan mengatasi stigma yang masih menghambat inklusi mereka. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan holistik, kita dapat mencapai tujuan ini dengan sukses.

Pertama-tama, kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang kondisi serta kebutuhan penyandang disabilitas adalah fondasi utama yang harus dibangun. Melalui edukasi yang tepat dan kampanye penyuluhan di tingkat masyarakat, persepsi

negatif dapat diubah menjadi inklusif dan mendukung. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bahwa disabilitas bukanlah suatu kelemahan, melainkan bagian dari keberagaman manusia yang perlu dihargai.

Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas adalah langkah penting berikutnya. Pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti jalanan yang rata, trotoar yang lebar dan bebas hambatan, serta fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, akan menciptakan lingkungan inklusif secara fisik dan sosial.

Di samping itu, kebijakan dan regulasi yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas harus ditegakkan dengan tegas. Peraturan yang jelas dan implementasi yang efektif akan memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dilindungi, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Tak kalah pentingnya adalah membangun kesadaran di kalangan pekerja sosial, tenaga medis, pendidik, dan profesional lainnya tentang cara terbaik untuk mendukung penyandang disabilitas. Pelatihan khusus dan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan individu akan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan dan dukungan yang sesuai dan bermartabat.

Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, adalah mendorong inklusi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Ini termasuk memberikan kesempatan yang setara dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik. Melalui inklusi aktif, kita tidak hanya membangun masyarakat yang inklusif secara struktural, tetapi juga menghargai dan memperkaya keberagaman yang ada.

Di Desa Luran, penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam aktif berpartisipasi dalam kelompok sosial masyarakat. Hal ini terungkap melalui pengalaman keluarga penyandang disabilitas yang melihat bagaimana mereka aktif

mengikuti kegiatan kelompok sosial di masyarakat. Demikian pula, pandangan masyarakat umum juga positif, mereka tidak keberatan dengan kehadiran penyandang disabilitas di dalam kelompok sosial masyarakat. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil yang belum sepenuhnya menerima, namun penyandang disabilitas tetap berusaha membuktikan kemampuannya dengan mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Pentingnya memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi di kelompok sosial masyarakat juga ditekankan. Dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, bahkan masyarakat luas, merupakan faktor penting dalam membantu penyandang disabilitas menyesuaikan diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Adapun cara mereka menyesuaikan diri dalam kelompok sosial bisa bermacam-macam, termasuk beradaptasi dengan berbagai reaksi dan kecepatan bergabung yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki cara tersendiri dalam menyuarakan pendapat, misalnya melalui forum kecil di dalam kelompok.

Meskipun ada tantangan dalam menerima penyandang disabilitas di masyarakat, namun keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosial telah berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak yang mereka miliki. Walau secara keseluruhan masyarakat menerima kehadiran mereka, namun masih ada isu mengenai perlakuan berbeda yang kadang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan jenis disabilitas yang dimiliki oleh individu dalam menghadapinya, karena setiap jenis disabilitas memerlukan pendekatan yang berbeda. Namun, hal ini tidak perlu ditonjolkan secara berlebihan.

Respons positif dari masyarakat dan dukungan dalam berinteraksi merupakan hal yang penting bagi penyandang disabilitas. Interaksi ini juga membantu mereka untuk berkembang dalam pola pikir dan menilai hal-hal yang berharga. Melalui pemberdayaan, mereka juga memiliki kesempatan untuk berkembang mandiri tanpa tergantung pada bantuan yang dapat

melemahkan semangat mereka. Penting diingat bahwa penyandang disabilitas bukanlah obyek untuk dikasihani, tetapi untuk diberdayakan agar dapat mandiri, terutama bagi diri mereka sendiri.

Secara keseluruhan, Desa Lauran telah menunjukkan sikap inklusifnya terhadap penyandang disabilitas. Dengan memahami dan mendukung kebutuhan mereka, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, Desa Lauran telah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dengan terus mendorong pemberdayaan dan kesadaran inklusi, Desa Lauran dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya.

Penerapan strategi mengatasi diservitas salah satunya dengan Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dapat dilakukan di Desa Lauran secara kolaboratif antara Pemerintah Desa Lauran dan BUMDesa Lauran. Para penyandang disabilitas memetakan kebutuhan mereka dengan pendekatan dari bawah ke atas, tetapi keputusan tentang program dan masukan diambil secara top-down oleh kepala desa. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lauran juga terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka sebagai staf atau pegawai unit kerja, serta melibatkan mereka sebagai pelaku seni untuk meningkatkan wisata di Desa Lauran.

Proses pemberdayaan ini telah mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Desa Lauran. Sekarang, masyarakat sering berkolaborasi dengan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat berinteraksi dan bergerak tanpa takut diskriminasi atas keterbatasan mereka. Selain itu, melalui kegiatan pemberdayaan, penyandang disabilitas juga dapat meningkatkan kemandirian mereka dengan adanya kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan pendapatan.

Adanya local champion yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas telah menjadi kekuatan yang mendorong adanya pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Proses pemberdayaan ini dilaksanakan dengan memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek atau aktor utama, sehingga memberikan peluang bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri dan potensi mereka. Hal ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk menerima penyandang disabilitas sebagai bagian yang layak dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Desa Lauran tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga pada aspek ekonomi. Melalui BUMDesa, pemberdayaan ini juga mencerminkan prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi lokal.

Pada awalnya, Desa Lauran dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pemetaan kebutuhan mereka. Hal ini penting untuk memahami secara langsung apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dan bagaimana mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pemberdayaan. Namun, keputusan terkait program dan masukan masih diambil oleh kepala desa, sehingga ada elemen top-down dalam pelaksanaan pemberdayaan ini.

Dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai staf atau pegawai unit kerja, serta melibatkan mereka dalam kegiatan seni untuk wisata di Desa Lauran, pemberdayaan ini telah memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan desa. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang aktif dalam menciptakan perubahan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan juga sangat penting. Melalui kolaborasi antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas, tercipta lingkungan yang inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan

berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi desa.

Selain itu, keberadaan local champion yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan ini. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga contoh yang baik bagi masyarakat dalam menerima dan menghargai keberagaman.

Proses pemberdayaan ini juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki potensi dan hak yang sama dengan masyarakat umum. Dengan demikian, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diatasi secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang disabilitas dalam dunia kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244.
- ASASANDI, I. G. N. A. (2018). PENGGUNAAN DANA DESA SESUAI DENGAN PERMENDES NOMOR 22 TAHUN 2016 DI KECAMATAN SAMBELIA TAHUN 2017. *GANEC SWARA*, 12(2), 83–91.
- BPS, A. (2023). *BPS Kota Ambon*. <https://ambonkota.bps.go.id/publication.html?page=2>
- Conyers, D. (2021). *Perencanaan sosial di dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dynaindar, I. J., & Priyono, N. (2022). Sriwedari Menjadi Desa Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Usaha Penanaman Pohon, Konservasi Penguatan Tebing dan Penghijauan Dalam Peningkatan Produktivitas. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 2(3), 17–26.
- Faizal, F. (2017). Diskursus pemberdayaan masyarakat. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 35–51.
- Habibi, R. S. (2014). *Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan oleh Universitas Brawijaya* [PhD Thesis, Brawijaya University]. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188447&val=6466&title=HAK-HAK%20PENYANDANG%20DISABILITAS%20DALAM%20BIDANG%20PENDIDIKAN%20BERDASARKAN%20PASAL%209%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2019%20TAHUN%202011%20TENTANG%20PENGESAHAN%20CONVENTION%20ON%20THE%20RIGHTS%20OF%20PERSONS%20WITH%20DISABILITIES%20STUDI%20PELAKSANAAN%20PEMENUHAN%20SARANA%20PENDIDIKAN%20OLEH%20UNIVERSITAS%20BRAWIJAYA>
- Hakim, L., Khusniah, N. L., & Mustafa, P. S. (2023). Sosialisasi Pendidikan Inklusif dan Disabilitas di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 44–49.
- Harahap, R. N. (2016). *Pemberdayaan Difabel Tuna Netra oleh Multistakeholder di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Program Pelatihan Pijat Fisioterapi sebagai upaya Mewujudkan Masyarakat Inklusif* [PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/95331>
- Huripah, E. (2019). Pekerjaan sosial dengan disabilitas di Indonesia. *Pekerjaan Sosial*, 13(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=971235&val>

- =14941&title=PEKERJAAN%20SOSIAL%20DENGAN%20DISABILITAS%20DI%20INDONESIA
- Imrie, R. (2018). Demystifying disability: A review of the *International Classification of Functioning, Disability and Health*. *Sociology of Health & Illness*, 26(3), 287–305. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2004.00391.x>
- Iskandar, D. R., & Si, M. (2017). Intervensi dalam pekerjaan sosial. Makassar: Penerbit Innawa. <https://www.academia.edu/download/61301444/Intervensi-Dalam-Pekerjaan-Sosial20191122-769-1ke0nkq.pdf>
- Mulyanah, M. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 128–135.
- Murwaningsih, S., & Wedjajati, R. S. (2021). Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas: (Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo). *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 41–57.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Organization, W. H. (2022). *Global report on health equity for persons with disabilities*. World Health Organization. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mK2tEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=\(World+Health+Organization,+2021+disability&ots=TYguYaxb7&sig=UC5efInfnQdgoO7S7mK8Y3Gya5k](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mK2tEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=(World+Health+Organization,+2021+disability&ots=TYguYaxb7&sig=UC5efInfnQdgoO7S7mK8Y3Gya5k)
- Organization, W. H., & Organization, W. H. (2020). United Nations International Children's Emergency Fund. *Innocenti Declaration on the Protection, Promotion and Support of Breastfeeding*. Florence, 2005.
- Probosiwi, R. (2017). Desa inklusi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 215–226.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/47635>
- Puspitasari, S. T., Audina, Y. T., Al Maududi, A., & Al Hasan, M. R. (n.d.). OPTIMALISASI INKLUSI DISABILITAS MELALUI KEGIATAN PENDAKIAN. *KATA PENGANTAR*, 81.
- Putri, P. (2024). *Keharmonisan Keluarga Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25794>
- Roebyantho, H. (2020). Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 47–58.
- Sangadji, S. (n.d.). *Penyandang Disabilitas di Ambon Butuh Perhatian*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.rri.co.id/maluku/berita/172375/penyandang-disabilitas-di-ambon-butuh-perhatian>
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2). <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/256>
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251–272.

Thohari, S. (2014). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27–37.